



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020

KOP. BPR SEJAHTERA

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Struktur Tata Kelola KOP. BPR Sejahtera telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi KOP. BPR Sejahtera posisi 31-12-2020 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.16.846.986.858, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.4.305.510.000. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di KOP. BPR Sejahtera selanjutnya.

2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA



Dalam menerapkan corporate governance, KOP. BPR Sejahtera mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR



KOP. BPR SEJAHTERA

Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-

Mojokerto

Mojokerto

Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- t. Anggaran Dasar (AD) KOP. BPR Sejahtera beserta perubahan-perubahannya.
- u. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR
- Melindungi kepentingan stakeholder
- Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum
- Menarik minat dan kepercayaan

4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA KOP. BPR SEJAHTERA

Prinsip-prinsip Tata Kelola di KOP. BPR Sejahtera sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparency (Keterbukaan)

- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan



implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku

2 Accountability

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR
- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system

3 Responsibility

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala



tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

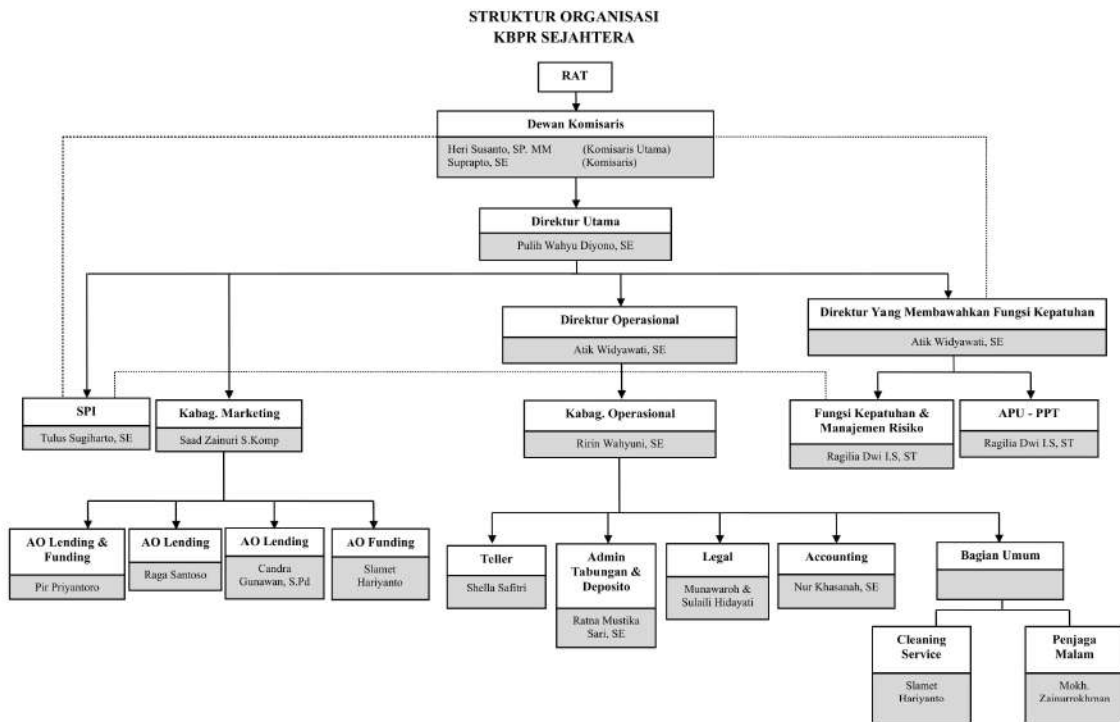
- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

4 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

1. KOP. BPR Sejahtera berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga KOP. BPR Sejahtera dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi
2. KOP. BPR Sejahtera juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan KOP. BPR Sejahtera sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA KOP. BPR SEJAHTERA



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi KOP. BPR Sejahtera per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 10 tanggal 23 Maret 2020 pada Notaris Bendy Aban Isbullah, SH adalah sebagai berikut :



Nama : Pulih Wahyu Diyono, SE
 Jabatan : Direktur Utama
 Tempat/Tanggal Lahir : Madiun/9-5-1977
 Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Mahardika Surabaya
 Lama Jabatan : 5 Tahun tahun
 Sertifikasi Direksi : KEU 005 1239 2015
 Masalaku : 2-7-2025
 Pengalaman Kerja Terakhir : Manager Lembaga Keuangan



Nama : Atik Widyawati, SE
Jabatan : Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto/28-4-1972
Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi Akuntansi STIE Malangkucecwara Malang
Lama Jabatan : 5 Tahun tahun
Sertifikasi Direksi : KEU 005 0387 2017
Masalaku : 18-11-2022
Pengalaman Kerja Terakhir : Kepala Bagian Operasional KBPR Sejahtera

Keterangan:

Seluruh anggota Direksi KOP. BPR Sejahtera telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RAT
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang



kepegawaian kepada pegawai.

9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
4. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
5. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi
6. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi KOP. BPR Sejahtera dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA DIREKSI | PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI |
|----|------------------------|--------------------------------------|
| | | KOP. BPR Sejahtera |
| 1 | Pulih Wahyu Diyono, SE | 0,38%% |
| 2 | Atik Widyawati, SE | Tidak Ada% |

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :



1. HUBUNGAN KEUANGAN

| NO | NAMA DIREKSI | HUBUNGAN KEUANGAN | | |
|----|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| | | ANGGOTA DIREKSI LAIN | DEWAN KOMISARIS | PEMEGANG SAHAM BPR |
| 1 | Pulih Wahyu Diyono, SE | Tidak ada hubungan | Hubungan Pinjaman/Kredit | Tidak ada hubungan |
| 2 | Atik Widyawati, SE | Tidak ada hubungan | Hubungan Pinjaman/Kredit | Tidak ada hubungan |

2. HUBUNGAN KELUARGA

| NO | NAMA DIREKSI | HUBUNGAN KELUARGA | | |
|----|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | ANGGOTA DIREKSI LAIN | DEWAN KOMISARIS | PEMEGANG SAHAM BPR |
| 1 | Pulih Wahyu Diyono, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |
| 2 | Atik Widyawati, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dekom PKOP. BPR Sejahtera per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 01 tanggal 01 Maret 2018 pada Notaris Bendy Aban Isbullah adalah sebagai berikut :



Nama : H. Heri Susanto, SP.MM
Jabatan : Komisaris Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik/13-1-1978
Pendidikan Terakhir : Magister Management Universitas Wijaya Putra Surabaya
Lama Jabatan : 5 tahun tahun
Sertifikasi Komisaris : KEU 005 0136 2012
Masalaku : 21-4-2022
Pengalaman Kerja Terakhir : Dosen Universitas Wijaya Putra Surabaya



Nama : H. Suprpto, SE
Jabatan : Komisaris
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto/16-1-1966
Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi STIE Malangkucecwara Malang
Lama Jabatan : 5 tahun tahun
Sertifikasi Komisaris : KEU 005 0013 2005
Masalaku : 22-2-2023
Pengalaman Kerja Terakhir : Komisaris Utama PT. BPR Harta Swadiri



Keterangan:

- Jumlah Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan Otoritaas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015
- Dewan Komisaaris KBPR Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dewan Komisaris

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis
4. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi



- yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
- Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris KOP. BPR Sejahtera dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS | PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS |
|----|------------------------------|--|
| | | KOP. BPR Sejahtera |
| 1 | H. Heri Susanto, SP.MM | 0,76%% |
| 2 | H. Suprpto, SE | 32,21%% |

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

| NO | NAMA DEWAN KOMISARIS | HUBUNGAN KEUANGAN | | |
|----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | | ANGGOTA DEKOM LAIN | DIREKSI | PEMEGANG SAHAM BPR |
| 1 | H. Heri Susanto, SP.MM | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Hubungan Pinjaman/Kredit |
| 2 | H. Suprpto, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |

2. HUBUNGAN KELUARGA

| NO | NAMA DEWAN KOMISARIS | HUBUNGAN KELUARGA | | |
|----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | ANGGOTA DEKOM LAIN | DIREKSI | PEMEGANG SAHAM BPR |
| 1 | H. Heri Susanto, SP.MM | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |
| 2 | H. Suprpto, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

- Komite Audit



2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Resiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi KOP. BPR Sejahtera posisi 31-12-2020, dapat diinformasikan bahwa modal inti KOP. BPR Sejahtera adalah sebesar Rp.4.305.510.000, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAT

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris KOP. BPR Sejahtera yang telah ditetapkan berdasarkan RAT tanggal 20 Februari 2021 adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

| NO | PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH ORANG | JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000) |
|-----------|--|---------------------|--|
| 1 | Jumlah keseluruhan gaji | 2 | 284.000.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 90.400.000 |
| 3 | Tantiem | 2 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 2 | 0 |
| 5 | Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RAT dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris | 2 | 0 |
| 6 | Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan | 0 | Mobil, perumahan, listrik, telepon, BPJS |
| | Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun | 2 | 374.400.000 |



2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

| NO | PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH ORANG | JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000) |
|----|--|--------------|---|
| 1 | Jumlah keseluruhan gaji | 2 | 148.950.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 28.250.000 |
| 3 | Tantiem | 2 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 2 | 0 |
| 5 | Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RAT dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris | 2 | 0 |
| 6 | Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan | 0 | BPJS |
| | Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun | 2 | 177.200.000 |

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2020 di KOP. BPR Sejahtera adalah sebagai berikut :

| NO | RASIO GAJI | SKALA PERBANDINGAN | |
|----|---|--------------------|------|
| 1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | 5,80 | 1,00 |
| 2 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | 1,18 | 1,00 |
| 3 | Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1,15 | 1,00 |
| 4 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi | 2,36 | 1,00 |
| 5 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi | 2,84 | 1,00 |

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2020 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris KOP. BPR Sejahtera adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA ANGGOTA DEKOM | JABATAN | JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN | JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA | JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI | PERSENTASE KEHADIRAN |
|----|--------------------|---------|--|-----------------------------------|--|----------------------|
|----|--------------------|---------|--|-----------------------------------|--|----------------------|



| | | | | FISIK | TELE KONFERENSI | |
|---|------------------------|-----------------|---|-------|-----------------|------|
| 1 | H. Heri Susanto, SP.MM | Komisaris Utama | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 2 | H. Suprpto, SE | Komisaris | 4 | 4 | 0 | 100% |

Keterangan:

KOP. BPR Sejahtera telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

1. Rencana Bisnis BPR,
terkait dengan Pandemi Covid-19 bagaimana rencana bisnis ke depan untuk BPR
1. Isu-isu strategis BPR
Solusi dalam menghadapi Pandemi Covid-19

1. Evaluasi /penetapan kebijakan strategis
Dengan adanya penerbitan Kebijakan Stimulus dari OJK
1. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2020 di KOP. BPR Sejahtera dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini

:

| INTERNAL FRAUD | JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEGAWAI TETAP | | PEGAWAI TIDAK TETAP | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Dalam 1 (satu) tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam proses penyelesaian di internal BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2020 yang terjadi di KOP. BPR Sejahtera dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

| PERMASALAHAN HUKUM | JUMLAH | |
|--|---------|--------|
| | PERDATA | PIDANA |
| Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 | 0 |
| Dalam proses penyelesaian | 0 | 0 |

Keterangan:

-

XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

KOP. BPR Sejahtera memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2020 di KOP. BPR Sejahtera dijelaskan pada tabel dibawah ini :

| No | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Rp. 000) | Keterangan |
|----|---|---------|--------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| 1 | | | | | | 0 | |
| 2 | | | | | | 0 | |

Keterangan:

Dalam tahun 2020, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka KOP. BPR Sejahtera telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa



KOP. BPR SEJAHTERA

Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-

Mojokerto

Mojokerto

Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

- Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
 3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
 4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
 5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
 6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
 7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
 8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
 9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
 10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
 11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di KOP. BPR Sejahtera sampai dengan posisi 31-12-2017 antara lain :

- Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan dan Prosedur Internal
- Melakukan review kepatuhan terhadap pelepasan kredit



KOP. BPR SEJAHTERA

Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-

Mojokerto

Mojokerto

Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL. Sepanjang tahun 2017, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip prudential banking
- Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
- Memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit kerja terkait pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari OJK
- Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait
- Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2020

- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
- Rasio NPL (net) adalah 1,96%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net)
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 50,94% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 12%
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka KOP. BPR Sejahtera telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam



KOP. BPR SEJAHTERA

Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-

Mojokerto

Mojokerto

Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

- melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
 3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di KOP. BPR Sejahtera sampai dengan posisi 31-12-2020 meliputi:

- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, Kantor Cabang dan Kantor Kas
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan KOP. BPR Sejahtera telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KOP. BPR Sejahtera untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Sesuai keputusan RUPS KOP. BPR Sejahtera, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan



Komisaris.

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodiq sebagai Auditor KOP. BPR Sejahtera untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020
- Laporan Keuangan KOP. BPR Sejahtera telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KOP. BPR Sejahtera untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq sebagai Auditor KOP. BPR Sejahtera untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020

Adapun KAP yang dipakai KOP. BPR Sejahtera pada tahun 2020 adalah :

| TAHUN | NAMA KAP | NO. PERJANJIAN KERJA | MASALAH PERJANJIAN KERJA | KAP TERDAFTAR |
|-------|----------------------|--|--------------------------|------------------|
| 2020 | Maroeto & Nur Shodiq | 09/WA-KAPMAS/XI/2020 dan 106/SPK/KBPR.SR/XI/2020 | 7-12-2020 s.d. 31-3-2021 | Terdaftar di OJK |

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Selain telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko, maka KBPR Sejahtera harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dengan standar penerapan Manajemen Risiko BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU



PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal KOP. BPR Sejahtera mencakup:

1. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
2. PE Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lainnya.
3. Hasil penilaian Tingkat Risiko Penerapan Manajemen Risiko Kop. BPR Sejahtera periode semester II Tahun 2020, dengan penilaian terhadap risiko kredit, dengan tingkat risiko inheren 2,44 (Sedang), tingkat risiko KPMR 2,00 (Memadai) sehingga Tingkat Risiko secara keseluruhan Rendah.

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di KOP. BPR Sejahtera dapat dijelaskan sebagaimana



tabel dibawah ini:

| NO | PENYEDIAAN DANA | JUMLAH | |
|----|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | DEBITUR (orang) | NOMINAL (Rp. 000) |
| 1 | Kepada Pihak Terkait | 15 | 940.421 |
| 2 | Kepada Pihak Tidak Terkait | 675 | 12.642.755 |

Keterangan:

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di KOP. BPR Sejahtera

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, KOP. BPR Sejahtera senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). KOP. BPR Sejahtera menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS KOP. BPR SEJAHTERA TAHUN 2021

1. Penurunan Non Performing Loan , dengan menerapkan langkah - langkah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas portofolio kredit
 - b. Meningkatkan frekuensi penagihan
 - c. Melakukan penagihan yang efektif dan efisien
 - d. Mapping area penagihan
 - e. Meningkatkan kualitas penggunaan SLIK dalam melakukan analisa kredit
 - f. Mengelola mitigasi risiko secara tepat, proses mapping debitur untuk proses restrukturisasi harus jelas dan sesuai kondisi bank, sehingga cashflow bank akan terlihat setelah melakukan treatment, dengan begitu BPR mengetahui posisi Strengths- Weakness - Opportunities - Threats (SWOT) untuk melakukan revisi dalam Rencana Bisnis BPR dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19
 - g. Menseleksi debitur yang layak mendapatkan program restrukturisasi sehingga BPR bisa survive dan diharapkan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut tidak mempengaruhi likuiditas BPR.



1. Peningkatan Fungsi Intermediasi, dengan menerapkan langkah - langkah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga
 - b. Meningkatkan penghimpunan dana murah
 - c. Melakukan terobosan dalam upaya peningkatan kemampuan pendanaan
 - d. Meningkatkan produktivitas penyaluran kredit secara prudent
 - e. Penyederhanaan proses kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati - hatian
 - f. Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk
 - g. Melakukan aliansi dan sinergi bisnis bersama dengan perusahaan lain
 - h. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kehandalan layanan semua segmen
 - i. Melakukan inisiasi berupa penawaran berbagai diversifikasi produk simpanan BPR yang dapat menarik minat dari calon nasabah, serta disisi lain untuk menopang likuiditas dan pertumbuhan aset, BPR melakukan inisiasi kerjasama penempatan antar bank
1. Peningkatan Efisiensi, dengan menerapkan langkah - langkah sebagai berikut :
 - a. Optimalisasi dan efisiensi biaya, dengan melakukan beberapa inisiatif untuk melakukan penghematan biaya
 - b. Memperkuat retail untuk memperbaiki rasio dana murah
 - c. Menurunkan penghimpunan dana mahal

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN KOP. BPR SEJAHTERA

Informasi kondisi keuangan KOP. BPR Sejahtera telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan



dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

KOP. BPR Sejahtera telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

KOP. BPR Sejahtera menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN KOP. BPR SEJAHTERA

1. KOP. BPR Sejahtera telah memberikan informasi mengenai produk KOP. BPR Sejahtera secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor KOP. BPR Sejahtera pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website
2. Selain itu, KOP. BPR Sejahtera menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

KOP. BPR Sejahtera aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

| NO | NAMA KEGIATAN | TUJUAN PENGGUNAAN | NILAI NOMINAL (Rp. 000) | LEMBAGA PENERIMA |
|----|----------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| 1 | HUT Karang Taruna Desa Pekukuhan | Partisipasi dalam HUT Karang Taruna desa Pekukuhan | 300.000 | Karang Taruna |
| 2 | Partisipasi Sosialisasi Narkoba | Partisipasi dalam meningkatkan pengetahuan | 100.000 | Kepolisian |



| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------|----------------|
| | | masyarakat | | |
| 3 | HUT RI Desa Pekukuhan | Partisipasi HUT RI Desa Pekukuhan | 250.000 | Desa Pekukuhan |

XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2020

| NILAI KOMPOSIT | PERINGKAT KOMPOSIT | DEFINISI PERINGKAT |
|---|--------------------|--|
| 1,75 | Sangat Baik | KOP. BPR Sejahtera telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh KOP. BPR Sejahtera |
| ANALISIS | | |
| <p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola KOP. BPR Sejahtera, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>Kop. BPR Sejahtera telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Kop. BPR Sejahtera, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Tata Kelola terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat lengkap.2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang sangat lengkap.3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap. <p>-</p> | | |



KOP. BPR SEJAHTERA
Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-
Mojokerto
Mojokerto
Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Kop. BPR Sejahtera ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di Kop. BPR Sejahtera. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan Stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Kop. BPR Sejahtera ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata kelola di Kop. BPR Sejahtera. Terima Kasih.



H. Heri Susanto, SP.MM
Komisaris Utama

Mojokerto, 26 April 2021
Pengurus KOP. BPR Sejahtera



Pulih Wahyu Diyono, SE
Direktur Utama



**TABULASI SELF ASSESSMENT KOP. BPR SEJAHTERA
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | Nilai Bobot Faktor |
|--|---|-----------------|------------|-----------|-------|--------------------|
| | | Struktur (S) | Proses (P) | Hasil (H) | S+P+H | |
| 1 | Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%) | 0,67 | 0,70 | 0,16 | 1,53 | 0,34 |
| 2 | Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (12.5%) | 0,61 | 0,95 | 0,30 | 1,86 | 0,26 |
| 3 | Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (2.5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%) | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0,22 |
| 5 | Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%) | 0,70 | 0,80 | 0,23 | 1,73 | 0,19 |
| 6 | Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%) | 0,90 | 0,80 | 0,23 | 1,93 | 0,21 |
| 7 | Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%) | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0,06 |
| 8 | Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%) | 1,00 | 0,80 | 0,15 | 1,95 | 0,16 |
| 10 | Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%) | 1,00 | 0,80 | 0,10 | 1,90 | 0,16 |
| 11 | Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%) | 1,00 | 0,70 | 0,10 | 1,80 | 0,15 |
| NILAI KOMPOSIT SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | | | | | | 1,75 |

| NILAI KOMPOSIT | PERINGKAT KOMPOSIT |
|-----------------------------|--------------------|
| 1,0 <= Nilai Komposit < 1,8 | Sangat Baik |
| 1,8 <= Nilai komposit < 2,6 | Baik |
| 2,6 <= Nilai Komposit < 3,4 | Cukup Baik |
| 3,4 <= Nilai Komposit < 4,2 | Kurang Baik |
| 4,2 <= Nilai Komposit < 5,0 | Tidak Baik |

PREDIKAT KOMPOSIT SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sangat Baik



KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : KOP. BPR SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2020

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan | X | | | | | |
| 2 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR | | X | | | | Salah satu Direksi berdomisili diluar Kabupaten Mojokerto, tetapi selama menjalankan aktivitasnya berada di Kabupaten Mojokerto |
| 3 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan) | X | | | | | Tidak merangkap jabatan pada bank - bank lain atau non bank dan partai politik |
| 4 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | X | | | | | Tidak memiliki hubungan keluarga |
| 5 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud | | X | | | | Tidak adanya penasihat perorangan atau penyedia jasa profesional |
| 6 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya | X | | | | | Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan sudah diangkat melalui rapat anggota khusus dan sudah di akte notariskan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 8 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6 | | 1,33 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,67 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas | X | | | | | |
| 2 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain | | X | | | | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada |
| 3 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris | | X | | | | |



| | | | | | | | |
|--|--|------|----|---|---|---|---|
| 4 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | | X | | | | Pengambilan keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat |
| 5 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS | X | | | | | |
| 6 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu | | X | | | | Terus berupaya melakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan tentang perbankan pada seluruh jenjang organisasi dan jabatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing - masing bagian. |
| 7 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian | | X | | | | Telah mengimplementasikan kompetensi yang ada dan berupaya terus meningkatkan kemampuan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan tentang prinsip kehati - hatian |
| 8 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | | X | | | | Tertuang dalam SOP pedoman tata tertib kerja direksi |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 14 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8 | | 1,75 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,70 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS | X | | | | | Laporan pertanggungjawaban direksi tahun 2020 telah disetujui dalam keputusan RAT 2020 |
| 2 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian | | X | | | | Telah dilaksanakan |
| 3 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi | | X | | | | Telah dilaksanakan |
| 4 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders | | X | | | | Peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM sudah dilaksanakan dalam peningkatan kerja BPR |
| 5 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan | X | | | | | Laporan disampaikan kepada OJK dan asosiasi BPR atau DPD |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 8 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5 | | 1,60 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA | | 0,16 | | | | | |

**KOP. BPR SEJAHTERA****Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-****Mojokerto**

Mojokerto

Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

| | | |
|-----------------|--|--|
| KELOLA (H): 10% | | |
|-----------------|--|--|

| | |
|---|-------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,53 |
| TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,34 |



KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : KOP. BPR SEJAHTERA
TAHUN LAPORAN : 2020

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang | X | | | | | Sudah lengkap terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris |
| 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan | X | | | | | Telah sesuai dengan ketentuan |
| 3 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan | X | | | | | Seluruh Dewan Komisaris sudah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat dalam rapat anggota khusus dan sudah diakte notariskan |
| 4 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR | X | | | | | Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah Mojokerto |
| 5 | BPR memiliki Komisaris Independen | | X | | | | |
| 6 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat | X | | | | | Tertuang dalam SOP pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris |
| 7 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum | | X | | | | Salah satu Dewan Komisaris merangkap sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali pada BPR lain |
| 8 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi | X | | | | | Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan semenda |
| 9 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen | X | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 11 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9 | | 1,22 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,61 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | | X | | | | Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan melakukan pengawasan kepada Direksi demi kemajuan perkembangan BPR |



| | | | | | | | |
|--|--|------|----|---|---|---|---|
| 2 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR | | X | | | | Sudah dilaksanakan |
| 3 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan | | X | | | | |
| 4 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan | | | X | | | Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan |
| 5 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris | | | X | | | Sudah dilaksanakan |
| 6 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat | | | X | | | Sudah dilaksanakan |
| 7 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS | | X | | | | Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dengan baik |
| 8 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi | | X | | | | Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 19 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8 | | 2,38 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,95 | | | | | |
| C | | | | | | | |
| HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris | | | X | | | Sudah dilaksanakan dalam risalah rapat dan sudah didokumentasikan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 3 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 3,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,30 | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,86 |
| TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,26 |



KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : KOP. BPR SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2020

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,00 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern | | | | | | |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko | | | | | | |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,00 | | | | | |
| C | HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
| 1 | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,00 | | | | | |



KOP. BPR SEJAHTERA

Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-

Mojokerto

Mojokerto

Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

| | |
|---|-------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 0,00 |
| TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,00 |



KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : KOP. BPR SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2020

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat | | X | | | | Berdasarkan SOP tentang benturan kepentingan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut | | X | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik | | X | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 2,00 |
| TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,22 |



KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : KOP. BPR SEJAHTERA
TAHUN LAPORAN : 2020

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|----|----|----|----|---------------------------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana | X | | | | | |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan | | X | | | | Masih dalam tahap pemahaman ketentuan |
| 3 | Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional | X | | | | | Terlaksana |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan | X | | | | | Terpenuhi dengan baik |
| 5 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan | | X | | | | Terpenuhi dengan baik |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 7 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5 | | 1,40 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,70 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 3 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 5 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | X | | | | Sudah terlaksana |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |



| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|-----------------------|
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 10 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan | | | X | | | Terpenuhi dengan baik |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris | | X | | | | Terpenuhi dengan baik |
| 3 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Terpenuhi dengan baik |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 7 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3 | | 2,33 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,23 | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,73 |
| TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,19 |



KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : KOP. BPR SEJAHTERA
TAHUN LAPORAN : 2020

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|--------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern | X | | | | | Sudah terlaksana |
| 2 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 3 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana) | | X | | | | Sudah dilaksanakan |
| 4 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 5 | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern | | X | | | | Sudah dilaksanakan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 9 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5 | | 1,80 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,90 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 2 | BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. | | X | | | | |
| 3 | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit | | X | | | | Terlaksana |
| 4 | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern | | X | | | | Sudah melaksanakan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 8 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |



| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|--------------------|
| 1 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan | | X | | | Sudah melaksanakan |
| 2 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | | X | | Sudah melaksanakan |
| 3 | BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | Sudah terlaksana |
| 4 | BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | Sudah terlaksana |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 9 | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4 | | 2,25 | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,23 | | | | |

| | |
|---|-------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,93 |
| TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,21 |



KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : KOP. BPR SEJAHTERA
TAHUN LAPORAN : 2020

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|-----------------------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | | | | | | | |
| STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud | | X | | | | Sudah terlaksana |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B | | | | | | | |
| PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 2 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | X | | | | Sudah terlaksana |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C | | | | | | | |
| HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 2 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Dilakukan sesuai dengan ketentuan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |



KOP. BPR SEJAHTERA

Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-

Mojokerto

Mojokerto

Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

| | |
|---|-------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 2,00 |
| TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,06 |



KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : KOP. BPR SEJAHTERA
TAHUN LAPORAN : 2020

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko | | | | | | |
| 2 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko | | | | | | |
| 3 | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,00 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi | | | | | | |
| 2 | Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris | | | | | | |
| 3 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material | | | | | | |
| 4 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh | | | | | | |
| 5 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | | | | | |
| 6 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh | | | | | | |
| 7 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,00 | | | | | |

**KOP. BPR SEJAHTERA****Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-****Mojokerto**

Mojokerto

Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

| HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|
| 1 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | | | | |
| 2 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 0,00 | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,00 | | | | |

| | |
|---|-------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 0,00 |
| TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,00 |



KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : KOP. BPR SEJAHTERA
TAHUN LAPORAN : 2020

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR | | X | | | | Terlaksana dengan baik |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan | | X | | | | Terlaksana dengan baik |
| 2 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan | | X | | | | Terlaksana dengan baik |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan |
| 2 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Terlaksana dengan baik |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 3 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 1,50 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,15 | | | | | |



KOP. BPR SEJAHTERA

Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-

Mojokerto

Mojokerto

Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

| | |
|---|-------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,95 |
| TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,16 |



KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : KOP. BPR SEJAHTERA
TAHUN LAPORAN : 2020

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | | X | | | | Sudah terlaksana |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 6 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 2 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR | | X | | | | Sudah terlaksana |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | X | | | | | Sudah terlaksana |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 1 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,10 | | | | | |



KOP. BPR SEJAHTERA

Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-

Mojokerto

Mojokerto

Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

| | |
|---|-------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,90 |
| TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,16 |



KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : KOP. BPR SEJAHTERA
TAHUN LAPORAN : 2020

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | | X | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | Sudah terlaksana |
| 2 | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 3 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Sudah terlaksana |
| 4 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Terlaksana |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 7 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4 | | 1,75 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,70 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | Sudah terlaksana |
| 2 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | X | | | | | Sudah terlaksana |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**KOP. BPR SEJAHTERA****Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-****Mojokerto**

Mojokerto

Telp. 0321-591515, 592607, Fax. 0321-592621

| | | |
|--|------|--|
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | 2 | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | 1,00 | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | 0,10 | |

| | |
|---|-------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,80 |
| TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,15 |

| 11 Faktor Tata Kelola BPR | |
|----------------------------------|--|
| Faktor 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi |
| Faktor 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris |
| Faktor 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite |
| Faktor 4 | Penanganan Benturan Kepentingan |
| Faktor 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan |
| Faktor 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern |
| Faktor 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern |
| Faktor 8 | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern |
| Faktor 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit |
| Faktor 10 | Rencana Strategis BPR |
| Faktor 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan |

Tabulasi Pengisian Indikator pada 11 Faktor Tata Kelola BPR

| Faktor | Indikator Terisi | Indikator Belum Terisi |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 19 | 0 |
| 2 | 18 | 0 |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 13 | 0 |
| 6 | 13 | 0 |
| 7 | 5 | 0 |
| 8 | 12 | 0 |
| 9 | 5 | 0 |
| 10 | 6 | 0 |
| 11 | 7 | 0 |
| Total | 106 | 0 |

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan | Skor | Penerapan | |
|----|---|-----------------|---|------|-----------|-------------|
| I. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | (Wajib diisi oleh BPR) | 1 | SB | Sangat Baik |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | 2 | B | Baik |
| 1. | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 1 | | 3 | CB | Cukup Baik |
| 2. | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 2 | Salah satu Direksi berdomisili di luar kabupaten Mojokerto, tetapi selama menjalankan aktivitasnya berada di kabupaten Mojokerto | 4 | KB | Kurang Baik |
| 3. | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). | 1 | Tidak merangkap jabatan pada bank bank lain atau non bank dan partai politik | 5 | TB | Tidak Baik |
| 4. | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | 1 | tidak memiliki hubungan keluarga | | | |
| 5. | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 2 | tidak adanya penasihat perorangan atau penyedia jasa profesional | | | |
| 6. | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | 1 | Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan Kepatutan dan sudah diangkat melalui rapat anggota khusus dan sudah di akte notariskan. | | | |

| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
|--|---|---|---|
| 7 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | 1 | |
| 8 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | 2 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan dilaksanakan sesuai dg aturan yang ada |
| 9 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. | 2 | Sudah dilaksanakan penyediaan data dan informasi |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2 | pengambilan keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 1 | |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 2 | terus berupaya melakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan tentang perbankan pada seluruh jenjang organisasi dan jabatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | 2 | telah mengimplementasikan kompetensi yang ada dan berupaya terus meningkatkan kemampuan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan tentang prinsip kehati-hatian. |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | 2 | tertuang dalam SOP pedoman tata tertib kerja direksi |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | 1 | Laporan pertanggungjawaban direksi tahun 2019 telah disetujui dalam keputusan RAT 2019 |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | 2 | telah dilaksanakan |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | 2 | telah dilaksanan |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 2 | peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM sudah dilaksanakan dalam peningkatan Kerja BPR |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | 1 | Laporan disampaikan kepada OJK dan asosiasi BPR atau DPD |

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan | Skor | Penerapan | |
|-----|---|-----------------|---|------|-----------|-------------|
| II. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | | (Wajib diisi oleh BPR) | 1 | SB | Sangat Baik |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | 2 | B | Baik |
| 1. | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. | 1 | Sudah lengkap terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris | 3 | CB | Cukup Baik |
| 2. | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. | 1 | telah sesuai dengan ketentuan | | | |
| 3. | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. | 1 | Seluruh Dewan Komisaris sudah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat dalam rapat anggota khusus dan sudah diakte notariskan | 4 | KB | Kurang Baik |
| 4. | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 1 | Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah Mojokerto | 5 | TB | Tidak Baik |
| 5. | BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | | | | |
| 6. | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | 1 | tertuang dalam SOP pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris | | | |
| 7. | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. | 2 | salah satu dewan komisaris merangkap sebagai komisaris utama dan pemegang saham pengendali pada BPR lain | | | |
| 8. | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. | 1 | Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan semenda | | | |
| 9. | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | 2 | | | | |

| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
|--|---|---|---|
| 10 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | 2 | Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan melakukan pengawasan kepada Direksi demi kemajuan perkembangan BPR |
| 11 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | 2 | Sudah dilaksanakan |
| 12 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 2 | |
| 13 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | 3 | Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan |
| 14 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | 3 | sudah dilaksanakan |
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat. | 3 | sudah dilaksanakan |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 2 | Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dengan baik |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | 2 | Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawas |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 3 | sudah di laksanakan dalam risalah rapat dan sudah dikumentasikan |

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|-------|--|-----------------|------------------------|
| II I. | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti \geq Rp 80 miliar) | | (Wajib diisi oleh BPR) |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1. | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | 0 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2. | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | 0 | |
| 3. | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | 0 | |
| 4. | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 5. | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | 0 | |

| Skor | Penerapan | |
|------|-----------|-------------|
| 1 | SB | Sangat Baik |
| 2 | B | Baik |
| 3 | CB | Cukup Baik |
| 4 | KB | Kurang Baik |
| 5 | TB | Tidak Baik |

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|-----|--|-----------------|--|
| IV. | Penanganan Benturan Kepentingan | | (Wajib diisi oleh BPR) |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1. | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | 2 | Berdasarkan SOP tentang benturan kepentingan |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2. | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 2 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 3. | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | 2 | |

| Skor | Penerapan | |
|------|-----------|-------------|
| 1 | SB | Sangat Baik |
| 2 | B | Baik |
| 3 | CB | Cukup Baik |
| 4 | KB | Kurang Baik |
| 5 | TB | Tidak Baik |

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan | Penerapan | | |
|----|---|-----------------|---------------------------------------|-----------|----|-------------|
| | | | | Skor | | |
| V. | Penerapan Fungsi Kepatuhan | | (Wajib diisi oleh BPR) | 1 | SB | Sangat Baik |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | 2 | B | Baik |
| 1. | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 1 | | 3 | CB | Cukup Baik |
| 2. | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | 2 | Masih dalam tahap pemahaman ketentuan | 4 | KB | Kurang Baik |
| 3. | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> | 1 | terlaksana | 5 | TB | Tidak Baik |
| 4. | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | 1 | terpenuhi dengan baik | | | |
| 5. | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | 2 | terpenuhi dengan baik | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | |
| 6. | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | 2 | sudah terlaksana | | | |
| 7. | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | 2 | sudah terlaksana | | | |
| 8. | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | sudah terlaksana | | | |
| 9. | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | sudah terlaksana | | | |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | terpenuhi dengan baik |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | 3 | terpenuhi dengan baik |
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 2 | terpenuhi dengan baik |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | terpenuhi dengan baik |

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|-----|--|-----------------|------------------------|
| VI. | Penerapan Fungsi Audit Intern | | (Wajib diisi oleh BPR) |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1. | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 1 | sudah terlaksana |
| 2. | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | 2 | sudah terlaksana |
| 3. | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | 2 | sudah di laksanakan |
| 4. | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | 2 | sudah terlaksana |
| 5. | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | 2 | sudah di laksanakan |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6. | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | 2 | sudah terlaksana |
| 7. | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | |
| 8. | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | 2 | Terlaksana |
| 9. | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | 2 | Sudah melaksanakan |

| Skor | Penerapan | |
|------|-----------|-------------|
| 1 | SB | Sangat Baik |
| 2 | B | Baik |
| 3 | CB | Cukup Baik |
| 4 | KB | Kurang Baik |
| 5 | TB | Tidak Baik |

| | | | |
|----|---|---|--------------------|
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 2 | Sudah melaksanakan |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 3 | Sudah melaksanakan |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | sudah terlaksana |
| 13 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah terlaksana |

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|
| VII | Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset > Rp 10 miliar) | | (Wajib diisi oleh BPR) |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1. | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 2 | sudah terlaksana |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2. | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | 2 | sudah terlaksana |
| 3. | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | sudah terlaksana |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | 2 | sudah terlaksana |
| 5 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Dilakukan sesuai dengan ketentuan |

| Skor | Penerapan | |
|------|-----------|-------------|
| 1 | SB | Sangat Baik |
| 2 | B | Baik |
| 3 | CB | Cukup Baik |
| 4 | KB | Kurang Baik |
| 5 | TB | Tidak Baik |

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF
BPR MODAL INTI ≥ 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO
SEMESTER 2 TAHUN 2020
BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO
SEMESTER 2 TAHUN 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan | Skor | | Penerapan | |
|------|---|-----------------|------------------------|------|---|-----------|-------------|
| | | | | 1 | 2 | S | B |
| VIII | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | | (Wajib diisi oleh BPR) | 1 | | S | Sangat Baik |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | 2 | | B | Baik |
| 1. | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. | 0 | | 3 | | C | Cukup Baik |
| 2. | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | 0 | | 4 | | K | Kurang Baik |
| 3. | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | 0 | | 5 | | T | Tidak Baik |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 4. | Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. | 0 | | | | | |
| 5. | Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 0 | | | | | |
| 6. | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | 0 | | | | | |
| 7. | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | 0 | | | | | |
| 8. | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 0 | | | | | |
| 9. | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 0 | | | | | |
| 10. | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | 0 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 11. | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 0 | | | | | |
| 12. | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 0 | | | | | |

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|------------|--|-----------------|---|
| IX. | Batas Maksimum Pemberian Kredit | | (Wajib diisi oleh BPR) |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1. | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 2 | Terlaksana dengan baik |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2. | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | 2 | Terlaksana dengan baik |
| 3. | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | 2 | Terlaksana dengan baik |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4. | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan |
| 5 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Terlaksana dengan baik |

| Skor | Penerapan | |
|------|-----------|-------------|
| 1 | SB | Sangat Baik |
| 2 | B | Baik |
| 3 | CB | Cukup Baik |
| 4 | KB | Kurang Baik |
| 5 | TB | Tidak Baik |

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|-----------|---|-----------------|------------------------|
| X. | Rencana Bisnis BPR | | (Wajib diisi oleh BPR) |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1. | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | 2 | Sudah Terlaksana |
| 2. | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Sudah Terlaksana |
| 3. | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | 2 | Sudah Terlaksana |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4. | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. | 2 | Sudah Terlaksana |
| 5. | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | 2 | Sudah Terlaksana |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 6. | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Sudah Terlaksana |

| Skor | Penerapan | |
|------|-----------|-------------|
| 1 | SB | Sangat Baik |
| 2 | B | Baik |
| 3 | CB | Cukup Baik |
| 4 | KB | Kurang Baik |
| 5 | TB | Tidak Baik |

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|------------|---|-----------------|------------------------|
| XI. | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | | (Wajib diisi oleh BPR) |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1. | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 2 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2. | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Sudah terlaksana |
| 3. | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Sudah terlaksana |
| 4. | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Sudah terlaksana |
| 5. | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Terlaksana |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 6. | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Sudah terlaksana |
| 7. | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | 1 | Sudah terlaksana |

| Skor | Penerapan | |
|------|-----------|-------------|
| 1 | SB | Sangat Baik |
| 2 | B | Baik |
| 3 | CB | Cukup Baik |
| 4 | KB | Kurang Baik |
| 5 | TB | Tidak Baik |

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penerapan Tata Kelola BPR Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Profil BPR

| | | |
|------------------|---|---|
| Nama BPR | : | KBPR SEJAHTERA |
| Alamat BPR | : | Jl. A. Yani Dsn. Pekukuhan RT 05 RW 03 Ds. Pekukuhan Mojosari-Mojokerto |
| Posisi Laporan | : | Desember 2020 |
| Modal Inti BPR | : | Rp 4.305.510.000 |
| Total Aset BPR | : | Rp 16.846.986.858 |
| Bobot Faktor BPR | : | B |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | v | | | | | - |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | | | | | | |
| 2) | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | | v | | | | Salah satu Direksi berdomisili di luar kabupaten Mojokerto, tetapi selama menjalankan aktivitasnya berada di kabupaten Mojokerto |
| 3) | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). | v | | | | | Tidak merangkap jabatan pada bank bank lain atau non bank dan partai politik |
| 4) | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | v | | | | | tidak memiliki hubungan keluarga |
| 5) | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | | v | | | | tidak adanya penasihat perorangan atau penyedia jasa profesional |
| 6) | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | v | | | | | Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan Kepatutan dan sudah diangkat melalui rapat anggota khusus dan sudah di akte notariskan. |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 8 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6 | 1,33 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 0,67 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | v | | | | | - |
| | 8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | | v | | | | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan dilaksanakan sesuai dg aturan yang ada |
| | 9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. | | v | | | | Sudah dilaksanakan penyediaan data dan informasi |
| | 10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat. | | v | | | | pengambilan keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat |
| | 11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | v | | | | | - |
| | 12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | | v | | | | terus berupaya melakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan tentang perbankan pada seluruh jenjang oragniasasi dan jabatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. |
| | 13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | | v | | | | telah mengimplementasikan kompetensi yang ada dan berupaya terus meningkatkan kemampuan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan tentang prinsip kehati-hatian. |
| | 14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | | v | | | | tertuang dalam SOP pedoman tata tertib kerja direksi |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 14 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 | | | | | | 1,75 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,70 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|-----|--|-----------------|-------------|----------|----------|----------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 15) | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | v | | | | | Laporan pertanggungjawaban direksi tahun 2019 telah disetujui dalam keputusan RAT 2019 |
| 16) | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | | v | | | | telah dilaksanakan |
| 17) | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | | v | | | | telah dilaksanakan |
| 18) | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> . | | v | | | | peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM sudah dilaksanakan dalam peningkatan Kerja BPR |
| 19) | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | v | | | | | Laporan disampaikan kepada OJK dan asosiasi BPR atau DPD |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 8 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | 1,60 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,16 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,53 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 | 0,34 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. | | | | | | Sudah lengkap terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. | v | | | | | |
| 2) | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. | v | | | | | telah sesuai dengan ketentuan |
| 3) | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. | v | | | | | Seluruh Dewan Komisaris sudah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat dalam rapat anggota khusus dan sudah diakte notariskan |
| 4) | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | v | | | | | Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah Mojokerto |
| 5) | BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. | | v | | | | - |
| 6) | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | v | | | | | tertuang dalam SOP pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris |
| 7) | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. | | v | | | | salah satu dewan komisaris merangkap sebagai komisaris utama dan pemegang saham pengendali pada BPR lain |
| 8) | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. | v | | | | | Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan semenda |
| 9) | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | | v | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 12 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9 | | | | | | 1,33 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0,67 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 10) | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | | v | | | | Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan melakukan pengawasan kepada Direksi demi kemajuan perkembangan BPR |
| 11) | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | | v | | | | Sudah dilaksanakan |
| 12) | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | | v | | | | - |
| 13) | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | | v | | | | Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan |
| 14) | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | | v | | | | sudah dilaksanakan |
| 15) | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat. | | v | | | | sudah dilaksanakan |
| 16) | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | | v | | | | Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dengan baik |
| 17) | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | | v | | | | Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawas |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 16 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 | | | | | | 2,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,80 |

| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 18) | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | | v | | | | sudah di laksanakan dalam risalah rapat dan sudah dikumentasikan | |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a | b | c | d | e | | |
| | | x | x | x | x | x | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 2,00 | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,20 | |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1,67 | |
| | Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 | | | | | | 0,28 | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan | |
|---|---|--|----------|----------|----------|-------|------------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) | | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | | |
| | 1) | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | | | | | | - |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 0 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 0,00 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | | |
| | 2) | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | | | | | | - |
| | 3) | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | | | | | | - |
| | 4) | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | | | | | | - |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | 0 | | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,00 | | | | | | |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | | | |
| 5) | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | | | | | | - | |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 0 | | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,00 | | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 0,00 | | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 | 0,00 | | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------------|----------|----------|----------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | | v | | | | Berdasarkan SOP tentang benturan kepentingan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 1,00 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | | v | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,80 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 3) | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | | v | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 2 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,20 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 2,00 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 | 0,22 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----|--|-----------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. | v | | | | | - |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. | | | | | | |
| 2) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | | v | | | | Masih dalam tahap pemahaman ketentuan |
| 3) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. | v | | | | | terlaksana |
| 4) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | v | | | | | terpenuhi dengan baik |
| 5) | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | | v | | | | terpenuhi dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 7 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | 1,4 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 0,90 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 6) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 7) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 8) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 9) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 10) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | terpenuhi dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 10 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | 2 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,80 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 11) | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | | | v | | | terpenuhi dengan baik |
| 12) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | | v | | | | terpenuhi dengan baik |
| 13) | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | terpenuhi dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 7 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | 2,33 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,23 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,73 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 | 0,19 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). | | | | | | sudah terlaksana |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | v | | | | | |
| 2) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 3) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | | v | | | | sudah di laksanakan |
| 4) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 5) | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | | v | | | | sudah di laksanakan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 9 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | 1,80 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 0,90 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 6) | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 7) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. | | v | | | | - |
| 8) | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | | v | | | | Terlaksana |
| 9) | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | | v | | | | Sudah melaksanakan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 8 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | 2 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,80 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 10) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan. | | v | | | | Sudah melaksanakan |
| 11) | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | v | | | Sudah melaksanakan |
| 12) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 13) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | sudah terlaksana |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 9 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | 2,25 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,23 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,93 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 | 0,21 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ektern | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | | v | | | | sudah terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 2 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 1,00 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 3) | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | sudah terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 4 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 2,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,80 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 4) | Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 5) | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Dilakukan sesuai dengan ketentuan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 4 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 2 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,20 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 2,00 |
| | Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 | | | | | | 0,06 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; | | | | | | - |
| | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko | | | | | | |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. | | | | | | |
| 2) | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | | | | | | - |
| 3) | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | | | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | 0,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 0,00 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 4) | Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. | | | | | | - |
| 5) | Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | | | | | | - |
| 6) | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | | | | | | - |
| 7) | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | | | | | | - |
| 8) | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | - |
| 9) | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | | | | | | - |
| 10) | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | | | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7 | 0,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,00 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 11) | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | - |
| 12) | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 0 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,00 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 0,00 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 | 0,00 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | | v | | | | Terlaksana dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 1,00 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | Terlaksana dengan baik |
| 3) | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | | v | | | | Terlaksana dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 4 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 2 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,80 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 4) | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan |
| 5) | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Terlaksana dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 3 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 1,50 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,15 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,95 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 | 0,16 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|-----------|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | | v | | | | Sudah Terlaksana |
| 2) | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Sudah Terlaksana |
| 3) | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | | v | | | | Sudah Terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 6 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | 2 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 1,00 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 4) | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. | | v | | | | Sudah Terlaksana |
| 5) | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | | v | | | | Sudah Terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 4 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 2 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,80 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 6) | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Sudah Terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 1 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,10 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,90 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 | 0,16 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 11 | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| | 1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | | v | | | | |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 1,00 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Sudah terlaksana |
| | 3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Sudah terlaksana |
| | 4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Sudah terlaksana |
| | 5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 7 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | 1,75 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,70 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| | 6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Sudah terlaksana |
| | 7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | v | | | | | Sudah terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 1,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,10 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,80 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 | 0,15 | | | | | |

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

| Faktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nilai Komposit |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|
| Total Penilaian Faktor | 0,34 | 0,28 | - | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,06 | - | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 1,77 |
| Predikat Komposit | Baik | | | | | | | | | | | |

Kesimpulan

Kop. BPR Sejahtera telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh KOP. BPR Sejahtera.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penerapan Tata Kelola BPR Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Profil BPR

| | | |
|----------------|---|--|
| Nama BPR | : | KBPR SEJAHTERA |
| Alamat BPR | : | Jl. A. Yani Dsn. Pekukuhan RT 05 RW 03 Ds. Pekukuhan Mojosari-Mojokerto |
| Posisi Laporan | : | Desember 2019 |
| Modal Inti BPR | : | Rp4.120.460.000 |
| Total Aset BPR | : | Rp15.422.604.971 |
| Bobot BPR | : | B |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan | |
|----|--|-----------------|-------------|----------|----------|----------|---|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | | |
| | 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | v | | | | | - | |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | | | | | | | |
| | 2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | | v | | | | Salah satu Direksi berdomisili di luar kabupaten Mojokerto, tetapi selama menjalankan aktivitasnya berada di kabupaten Mojokerto | |
| | 3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). | v | | | | | Tidak merangkap jabatan pada bank bank lain atau non bank dan partai politik | |
| | 4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | v | | | | | tidak memiliki hubungan keluarga | |
| | 5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | | v | | | | tidak adanya penasihat perorangan atau penyedia jasa profesional | |
| | 6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | v | | | | | Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan Kepatutan dan sudah diangkat melalui rapat anggota khusus dan sudah di akte notariskan. | |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 8 | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6 | | | | | | 1,33 | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0,67 | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------------|----------|----------|----------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | v | | | | | - |
| | 8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | | v | | | | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan dilaksanakan sesuai dg aturan yang ada |
| | 9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. | | v | | | | Sudah dilaksanakan penyediaan data dan informasi |
| | 10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | | v | | | | pengambilan keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat |
| | 11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | v | | | | | - |
| | 12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | | v | | | | terus berupaya melakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan tentang perbankan pada seluruh jenjang organisasi dan jabatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. |
| | 13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | | v | | | | telah mengimplementasikan kompetensi yang ada dan berupaya terus meningkatkan kemampuan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan tentang prinsip kehati-hatian. |
| | 14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | | v | | | | tertuang dalam SOP pedoman tata tertib kerja direksi |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 14 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 | | | | | | 1,75 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,70 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 15) | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | v | | | | | Laporan pertanggungjawaban direksi tahun 2019 telah disetujui dalam keputusan RAT 2019 |
| 16) | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | | v | | | | telah dilaksanakan |
| 17) | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | | v | | | | telah dilaksanakan |
| 18) | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> . | | v | | | | peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM sudah dilaksanakan dalam peningkatan Kerja BPR |
| 19) | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | v | | | | | Laporan disampaikan kepada OJK dan asosiasi BPR atau DPD |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 8 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | 1,6 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,16 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,53 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 | 0,31 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | | Skala Penerapan | | | | | Keterangan | |
|----------|---|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| | | | SB | B | CB | KB | TB | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | | | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | | | |
| | 10) | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | | v | | | | Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan melakukan pengawasan kepada Direksi demi kemajuan perkembangan BPR | |
| | 11) | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | | v | | | | Sudah dilaksanakan | |
| | 12) | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | | v | | | | - | |
| | 13) | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | | v | | | | Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan | |
| | 14) | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | | v | | | | sudah dilaksanakan | |
| | 15) | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | | v | | | | sudah dilaksanakan | |
| | 16) | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | | v | | | | Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dengan baik | |
| | 17) | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | | v | | | | Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawas | |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 16 | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 | | | | | | 2,00 | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,80 | |

| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 18) | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | | v | | | | sudah di laksanakan dalam risalah rapat dan sudah dikumentasikan | |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 2,00 | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,20 | |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1,67 | |
| | Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 | | | | | | 0,25 | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|---|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| | 1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | | | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 0,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 0,00 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | | | | | | - |
| | 3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | | | | | | - |
| | 4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | | | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | 0,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,00 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| | 5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | | | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | | |
| Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 0,00 | | | | | | |
| Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,00 | | | | | | |
| Penjumlahan S + P + H | 0,00 | | | | | | |
| Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 | 0,00 | | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| | 1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | | v | | | | Berdasarkan SOP tentang benturan kepentingan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 1,00 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | | v | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,80 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| | 3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | | v | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 0,20 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 2,00 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 2,00 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 | 0,20 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. | v | | | | | - |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. | | | | | | |
| 2) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | | v | | | | Masih dalam tahap pemahaman ketentuan |
| 3) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. | | | | | | terlaksana |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. | v | | | | | |
| 4) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | v | | | | | terpenuhi dengan baik |
| 5) | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | | v | | | | terpenuhi dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 7 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | | | | | | 1,40 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0,70 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 6) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 7) | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 8) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 9) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 10) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | terpenuhi dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 10 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,80 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 11) | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | | | v | | | terpenuhi dengan baik |
| 12) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | | v | | | | terpenuhi dengan baik |
| 13) | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | terpenuhi dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 7 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | 2,33 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,23 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,73 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 | 0,17 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| | 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). | v | | | | | sudah terlaksana |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | | | | | | |
| | 2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | | v | | | | sudah terlaksana |
| | 3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | | v | | | | sudah di laksanakan |
| | 4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | | v | | | | sudah terlaksana |
| | 5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | | v | | | | sudah di laksanakan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 9 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | 1,80 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 0,90 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | | v | | | | sudah terlaksana |
| | 7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. | | v | | | | - |
| | 8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | | v | | | | Terlaksana |
| | 9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | | v | | | | Sudah melaksanakan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 8 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,80 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 10) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan. | | v | | | | Sudah melaksanakan |
| 11) | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | v | | | Sudah melaksanakan |
| 12) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | sudah terlaksana |
| 13) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | sudah terlaksana |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 9 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | 2,25 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,23 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,93 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 | 0,19 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ektern | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| | 1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | | v | | | | sudah terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 1,00 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | | v | | | | sudah terlaksana |
| | 3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | sudah terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 4 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,80 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| | 4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | | v | | | | sudah terlaksana |
| | 5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Dilakukan sesuai dengan ketentuan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 4 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,20 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 2,00 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 | 0,05 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| | 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; | | | | | | - |
| | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; | | | | | | |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. | | | | | | |
| | 2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | | | | | | - |
| | 3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | | | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | 0,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 0,00 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|---|----|----|----|------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 4) Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. | | | | | | - |
| | 5) Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | | | | | | - |
| | 6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | | | | | | - |
| | 7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | | | | | | - |
| | 8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | - |
| | 9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | | | | | | - |
| | 10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | | | | | | - |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|----------|----------|----------|---|
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7 | 0,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,00 | | | | | |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | | |
| 11) | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | - |
| 12) | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 0 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 0,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,00 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 0,00 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 | 0,00 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| | 1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | | v | | | | Terlaksana dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 1,00 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | Terlaksana dengan baik |
| | 3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | | v | | | | Terlaksana dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 4 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,80 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| | 4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan |
| | 5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Terlaksana dengan baik |

| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 3 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 1,50 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,15 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,95 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 | 0,15 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|-----------|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| | 1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | | v | | | | Sudah Terlaksana |
| | 2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Sudah Terlaksana |
| | 3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | | v | | | | Sudah Terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 6 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 1,00 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. | | v | | | | Sudah Terlaksana |
| | 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | | v | | | | Sudah Terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 4 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,80 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| | 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Sudah Terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 1,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,10 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,90 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 | 0,14 | | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 11 | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | | v | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | 2,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | 1,00 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Sudah terlaksana |
| 3) | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Sudah terlaksana |
| 4) | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Sudah terlaksana |
| 5) | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 7 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | 1,75 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | 0,70 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 6) | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Sudah terlaksana |
| 7) | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | v | | | | | Sudah terlaksana |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | 1,00 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,10 | | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 1,80 | | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 | 0,14 | | | | | |

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

| Faktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nilai Komposit |
|-------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|
| Total Penilaian Faktor | 0,31 | 0,25 | - | 0,20 | 0,17 | 0,19 | 0,05 | - | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 1,59 |
| Predikat Komposit | Sangat Baik | | | | | | | | | | | |

Kesimpulan

Dari hasil self assesment setelah penerapan manajemen risiko, total nilai komposit yang awalnya sebanyak 1,77 menjadi 1,59. hal tersebut menunjukkan ada perbaikan pada setiap faktor setelah penerapan manajemen risiko. Semakin efisien dan efektif penerapan manajemen risiko maka tata kelola BPR akan semakin baik pula.

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

| Faktor Tata Kelola | Jumlah Pertanyaan | | | Penilaian Structure (S) | | | | | | | Penilaian Process (P) | | | | | | | Penilaian Outcome (H) | | | | | | | Jumlah Nilai SPO per Faktor | Nilai akhir Faktor |
|--------------------|-------------------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|--------|-------|-----------------------|----|---|---|------|--------|-------|-----------------------|---|---|---|------|--------|-------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | Nilai Structure (S) | | | | | Jumlah | Bobot | Nilai Process (P) | | | | | Jumlah | Bobot | Nilai Outcome (H) | | | | | Jumlah | Bobot | | |
| | S | P | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| Faktor 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22% |
| Nilai Awal | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rata-rata | | | | | | | | | 1,33 | 0,67 | | | | | 1,75 | 0,70 | | | | | | 1,60 | 0,16 | 1,53 | 0,34 | |
| Faktor 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16,67% |
| Nilai Awal | | | | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rata-rata | | | | | | | | | 1,22 | 0,61 | | | | | 2,38 | 0,95 | | | | | | 3,00 | 0,30 | 1,86 | 0,31 | |
| Faktor 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nilai Awal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rata-rata | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Faktor 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,11% |
| Nilai Awal | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rata-rata | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | 2,00 | 0,80 | | | | | | 2,00 | 0,20 | 2,00 | 0,22 | |
| Faktor 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11,11% | |
| Nilai Awal | | | | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Rata-rata | | | | | | | | | 1,40 | 0,70 | | | | | 2,00 | 0,80 | | | | | | 2,33 | 0,23 | 1,73 | 0,19 | |
| Faktor 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11,11% | |

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

| Faktor Tata Kelola | Jumlah Pertanyaan | | | Penilaian Structure (S) | | | | | | | Penilaian Process (P) | | | | | | | Penilaian Outcome (H) | | | | | | | Jumlah Nilai SPO per Faktor | Nilai akhir Faktor |
|--------------------|-------------------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|--------|-------|-----------------------|----|---|---|---|--------|-------|-----------------------|---|---|---|---|--------|-------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | Nilai Structure (S) | | | | | Jumlah | Bobot | Nilai Process (P) | | | | | Jumlah | Bobot | Nilai Outcome (H) | | | | | Jumlah | Bobot | | |
| | S | P | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 40% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 10% | | |
| Faktor 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20% |
| Nilai Awal | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rata-rata | | | | | | | | | 1,33 | 0,67 | | | | | | 1,75 | 0,70 | | | | | | 1,60 | 0,16 | 1,53 | 0,31 |
| Faktor 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,00% |
| Nilai Awal | | | | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rata-rata | | | | | | | | | 1,22 | 0,61 | | | | | | 2,38 | 0,95 | | | | | | 3,00 | 0,30 | 1,86 | 0,28 |
| Faktor 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nilai Awal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rata-rata | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faktor 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10,00% |
| Nilai Awal | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rata-rata | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | 2,00 | 0,80 | | | | | | 2,00 | 0,20 | 2,00 | 0,20 |
| Faktor 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10,00% |
| Nilai Awal | | | | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Rata-rata | | | | | | | | | 1,40 | 0,70 | | | | | | 2,00 | 0,80 | | | | | | 2,33 | 0,23 | 1,73 | 0,17 |
| Faktor 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10,00% |
| Nilai Awal | | | | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |

